

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A.D. Belfante dan H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- A.W. Bradley, K.D. Ewing dan C.J.S. Knight, *Constitutional and Administrative Law*, Sixteenth Edition, Pearson Education Limited, London, 2015.
- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Achman Ichsan, *Hukum Perdata I B*, Pembimbing, Jakarta, 1967.
- Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2008.
- Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jala Permata, Jakarta, 2008.
- C . Asser – M.C.L.vd. Grinten, *Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Vertegenwoordiging en Rechperson, De Vertegenwoordiging*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1973.
- Djaja S. Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kuasa*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017.

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.

George Whitecross Patton, *A Text-Book of Jurisprudence*, Oxford at the Clarendon Press, Second Edition, 1953.

Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenamedia, Jakarta, 2018.

H.A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

-----, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

-----, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

-----, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

-----, *Memahami dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, Waarmerking, Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2022.

-----, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.

Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., Amerika Serikat, 1987.

Herlien Budiono, *Asas-asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

-----, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata, di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

-----, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

- Indroharto, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009.
- J. Satrio, *Perwakilan dan Kuasa*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- John M. Enchols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Leny Agustan dan Khairulnas, *Panduan Notaris/PPAT dalam Menghadapi Gugatan Perdata*, UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Luhut Pangaribuan, *Advokat and Content of Court-Proses di Dewan Kehormatan Provesi*, Djambatan, Jakarta.
- M. Hadin Muhjad, *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.
- , *Komentar Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cv. Zakir, Medan.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia (Latar Belakang dan Sejarahnya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Meliala Djaja S, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1982.

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Mr. NE Algra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Bia Cipta, Jakarta, 1977.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- N.E. Algra, H.R.W Gokkel dkk, *Fockema Andreae's Rechtgeleerd Handwoordenboek*, H.D. Tjeenk Willink-Alphen aan den Rjin, 1981.
- Nur Laila Musfa'ah dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- Philippus M. Hadjon, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya Post, 2001.
- , *Pemerintahan Menurut Hukum*, Yurika, Surabaya, 1992.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cetakan 17, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984.
- R. Soesilo, *RGB/HIR dengan Penjelasan*, Politea, Bogor, 1985.
- Ridwan H. Halim, *Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roni Hanitjo Siemitro, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda – Indonesia*, Ichtiar baru, Van Hoeve, Jakarta, 1995.
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu, Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.

Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.

Setiawan Rachmad, *Hukum Perwakilan dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda saat ini*, PT. Tatanusa, Jakarta.

Sharan B. and Merriam, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*, 2007.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.

Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, 2002.

Subekti, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

-----, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.

-----, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Alfabeta, Yogyakarta, 2013.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halam Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Tresna Mr. R, *Komentar atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR Dihubungkan dengan Ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1955*, Pradnya Paramita, Jakarta.

V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Yudhi Setiawan dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktek (dilengkapi dengan beberapa kasus pertanahan)*, Raja Grafindo, Depok, 2017.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 700).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tatacara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

### C. Disertasi, Tesis, Jurnal dan Internet

Azmi Fendri, Busyra Azheri, "Fundamental Principles of Mineral and Coal Resources Management in the Regional Autonomy Era", *KANUN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 24, No. 3.

Azmi Fendri, "PERBAIKAN SISTEM HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. 2, No. 2.

Ari Afrianto, *Fungsi Notaris Dalam Memberikan Legalisasi Atas Akta Di Bawah Tangan*, Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019.

Dwi Nurdiansyah Santosa, *Analisis Yuridis Hak Imunitas dan Malpraktek Advokat Serta Implementasinya di Kota Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2009.

Edwar, dkk, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 1, 2019.

Fayakundia Putra Sufi dan Rusdianto Sesung, *Pemisahan Jabatan Pejabat Umum di Indonesia*, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22, No. 23, 2017.

Fitri Yuli, *Akibat Hukum Perubahan Akta Sewa Menyewa Yang Dibuat Oleh Notaris Tanpa Dihadiri Oleh Satu Pihak*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, 2022.

H.M. Imron, *Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi*, Renvoi Nomor 10/34 April, 2006.

Herlien Budiono, *Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia, Peran Notaris Sejalan dengan Politik Hukum Pemerintah di dalam Pembuatan Akta Berkaitan dengan Pendirian Perusahaan, Peraturan dalam Rangka Pemenuhan Ease of Doing Business di Indonesia*, Disampaikan pada International Union of Notaries (UINL), Jakarta, 2019.

Hendra Setiawan Boen, *Tinjauan Terhadap Surat Kuasa Mutlak*, Diambil dari <http://www.anggreklawfirm.co.id/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=102>, Diakses tanggal 14 Januari 2023.

Ida Rosida Suryana, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1999.

Kurnia Warman dkk, "PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI DI KABUPATEN KAMPAR" *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 3, Maret 2023.

Khairani, "SULITNYA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 178 K/PDT.SUS-PHI/2015)", *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, Juni 2023

Legalitas, *Legalisasi Notaris*, Diambil dari <https://legalitas.org/legalisasi-notaris#:~:text=adalah%20proses%20pengesahan%20tandatangan%20di,dar i%20dokumen%20bawah%20tangan%20tersebut>, Diakses tanggal 06 Februari 2023.

Lukman Santoso AZ dalam Yussy Adelina Mannas dkk, "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA NOMINEE DALAM JUAL BELI TANAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/Pdt/2022)", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023

Libera, *Akta Notaris, Legalisasi dan Waarmerking, Apa Perbedaan Ketiganya?* Diambil dari <https://libera.id/blogs/perbedaan-akta-notaris-dan-bawah-tangan/>, Diakses tanggal 06 Februari 2023.

N. Wahyu Triashari dan Sagung Putri M.E Purwani, *Analisis Yuridis Akta Di Bawah Tangan Yang Diwaarmerking dan Dilegalisasi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Nawaaf Abdullah, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik*, Jurnal Akta, Vol 4. No. 4, 2017.

Paulus Efendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Makalah Dalam Rangka Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2003.

Phillipus M. Harjon, *Eksistensi dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Figur Hukum Akta PPAT*, Makalah Ceramah, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1996.

-----, *Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 Tahun XI, Januari-Februari, 1996.

Putusan Pengadilan Negeri Jember, *Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.Jr.*

Putusan Pengadilan Negeri Medan, *Nomor 704/Pdt.G/2017/PN.Mdn.*



Rakesh Garg, *Methodology for Research*, Diambil dari <http://www.ncbi.nlm.gov/pubmed/27729690>, Diakses tanggal 01 Maret 2023.

Syofiarti dkk, “PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP TINDAKAN PEMALSUAN DATA PADA AKTA JUAL BELI OLEH PENGHADAP”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023

Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.

Thalha Alhamid dan Budur Anufia, *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*, STAIN, Sorong, 2019.

Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum Serta PPAT Dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, disampaikan pada Up Grading Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta, 2001.

Windhi Handoko, *Materi Mata Kuliah Teknik Pembuatan Akta I*, Dalam Jurnal Akta Dimas Agung Prastomo dan Akhmad Khisni, *Akibat Hukum Akta Di bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris*, Vol 4, Desember 2017, Universitas Islam Sultan Agung.

